

ANALISIS STRATEGI OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN FISKAL DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Zarma Hanifah¹, Aldri Frinaldi², Nora Eka Putri³, Asnil⁴
^{1,2,3,4}Magister Ilmu Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
zarmahanifah02@gmail.com¹,
aldri@fis.unp.ac.id²,
noraekaputri@fis.unp.ac.id³,
asnilmelayu@gmail.com⁴

ABSTRACT

Local Own Source Revenue (PAD) is a crucial component in assessing the level of fiscal independence and the ability of local governments to finance development autonomously. However, the contribution of PAD in Padang Pariaman Regency's Revised Local Government Budget (APBD) for 2024 remains low less than ten percent of the total regional revenue indicating high fiscal dependency on central government transfers. This study aims to analyze the current condition of PAD in Padang Pariaman Regency, identify the key factors hindering its growth, and formulate relevant optimization strategies to strengthen local fiscal independence. The research employs a descriptive qualitative method through document analysis of local government regulations, Central Bureau of Statistics (BPS) reports, and recent academic literature. The findings reveal that the low PAD contribution is influenced by a narrow local tax base, low taxpayer compliance, limited capacity of financial management personnel, and unproductive asset utilization. Recommended strategies include tax and levy intensification and extensification, productive asset management, implementation of digital-based tax and levy systems, and enhancement of transparency and public participation. The consistent implementation of these strategies is expected to strengthen fiscal independence, expand fiscal space for development, and promote transparent, accountable, and sustainable local financial governance.

Keywords: local own-source revenue; fiscal independence; optimization strategy; padang pariaman regency

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam menilai tingkat kemandirian fiskal dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri. Namun, kontribusi PAD Kabupaten Padang Pariaman dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 masih tergolong rendah, yakni kurang dari sepuluh persen dari total pendapatan daerah, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi aktual PAD Kabupaten Padang Pariaman, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat

peningkatannya, serta merumuskan strategi optimalisasi yang relevan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi dokumen melalui penelaahan terhadap peraturan daerah, laporan Badan Pusat Statistik (BPS), serta literatur akademik terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya PAD disebabkan oleh sempitnya basis pajak daerah, rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan kapasitas aparatur pengelola keuangan, serta belum optimalnya pemanfaatan aset daerah. Strategi yang direkomendasikan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, pengelolaan aset secara produktif, penerapan digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi, serta peningkatan transparansi dan partisipasi publik. Implementasi strategi ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal, memperluas ruang fiskal pembangunan, serta mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah; Kemandirian Fiskal; Strategi Optimalisasi; Padang Pariaman

A. Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen fundamental dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik secara mandiri dan akuntabel. Melalui APBD, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pengelola dana publik, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut (Dewi Anggadini et al., 2021) APBD adalah wujud konkret kebijakan publik dalam bentuk angka yang menghubungkan tujuan pembangunan dengan alokasi sumber daya. Dengan demikian,

keberhasilan pengelolaan APBD sangat bergantung pada kapasitas daerah dalam menghimpun dan mengelola pendapatan, terutama melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran strategis sebagai indikator utama kemandirian fiskal daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal dan otonomi keuangan daerah tersebut. (Sisdianto, 2024) menegaskan bahwa PAD tidak hanya sekadar angka penerimaan, tetapi juga cerminan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal dan mengelola sumber daya secara efektif. Namun, berbagai

daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam meningkatkan PAD, karena masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya ruang fiskal bagi daerah untuk membiayai program pembangunan sesuai karakteristik dan kebutuhan lokal (Amin et al., 2024).

Fenomena tersebut juga dialami oleh Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan dokumen Perubahan APBD Tahun 2024, sebagian besar penerimaan daerah masih bersumber dari transfer pemerintah pusat, sedangkan kontribusi PAD masih relatif kecil, yakni kurang dari sepuluh persen dari total pendapatan daerah. Temuan penelitian (Latifa et al., 2025) menunjukkan bahwa meskipun efektivitas pelaksanaan APBD di Padang Pariaman cukup baik dari sisi realisasi anggaran, namun rendahnya kontribusi PAD mencerminkan lemahnya kemandirian fiskal daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kemampuan daerah dalam menghimpun

pendapatan sendiri dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat.

Beberapa penelitian terdahulu juga menyoroti pentingnya strategi penguatan PAD dalam mendorong kemandirian fiskal. (Permana, 2024) menekankan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia daerah merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD. Sementara itu, (Haykal et al., 2025) menemukan bahwa penguatan basis pajak daerah, peningkatan retribusi, serta penerapan inovasi digital dalam sistem pelayanan publik dapat mempercepat peningkatan PAD. Selain itu, (Eljawati & Nurafdaliana, 2024) menegaskan bahwa optimalisasi pemanfaatan aset daerah berperan penting dalam menciptakan efisiensi fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Hal tersebut menunjukkan bahwa strategi optimalisasi PAD harus dilakukan secara komprehensif melalui intensifikasi, ekstensifikasi, digitalisasi, dan pengelolaan aset yang produktif.

Dalam konteks Kabupaten

Padang Pariaman, strategi optimalisasi PAD menjadi hal yang sangat mendesak. Peningkatan belanja modal dalam APBD 2024 menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk memperluas pembangunan, namun kapasitas PAD yang stagnan berpotensi menimbulkan ketergantungan fiskal berkepanjangan terhadap dana pusat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kondisi aktual PAD Kabupaten Padang Pariaman dalam Perubahan APBD Tahun 2024, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat peningkatannya, serta merumuskan strategi optimalisasi yang tepat untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian manajemen keuangan publik serta menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif

dengan metode studi dokumen (documentary research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis data sekunder berupa dokumen resmi pemerintah daerah, laporan Badan Pusat Statistik (BPS), serta literatur akademik yang relevan dengan pengelolaan keuangan publik dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menelaah secara mendalam bagaimana kondisi PAD Kabupaten Padang Pariaman, faktor-faktor yang menghambat peningkatannya, serta strategi optimalisasi yang dapat diterapkan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Objek penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Pariaman, dengan fokus analisis pada struktur pendapatan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, serta strategi optimalisasi yang diimplementasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari berbagai dokumen resmi, seperti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Kabupaten Padang Pariaman,

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD, serta laporan keuangan yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, penelitian ini juga memperkaya kajian dengan berbagai literatur ilmiah dan hasil penelitian terbaru terkait strategi optimalisasi PAD.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua langkah utama. Pertama, studi dokumentasi, yaitu penelaahan terhadap dokumen kebijakan, laporan keuangan, dan data statistik daerah yang berkaitan langsung dengan PAD dan komposisi APBD Kabupaten Padang Pariaman. Kedua, studi pustaka (library research), dengan mengkaji teori dan hasil penelitian terdahulu mengenai manajemen keuangan publik, strategi peningkatan PAD, dan konsep kemandirian fiskal daerah. (Sugiyono & Lestari, 2021) menjelaskan bahwa kombinasi kedua teknik tersebut memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya secara konseptual dan faktual, sehingga hasil analisis menjadi lebih valid dan kontekstual.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif-analitis. Analisis deskriptif

digunakan untuk menggambarkan kondisi aktual PAD Kabupaten Padang Pariaman, termasuk kontribusinya terhadap total pendapatan daerah dan rasio kemandirian fiskalnya. Sementara itu, analisis kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat peningkatan PAD serta merumuskan strategi optimalisasi yang sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. Analisis ini dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dijelaskan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2020). Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai strategi penguatan PAD sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal di Kabupaten Padang Pariaman.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kondisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peranan penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, karena menggambarkan

sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri tanpa ketergantungan pada pemerintah pusat. Berdasarkan dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer pusat, sedangkan kontribusi PAD hanya berkisar di bawah 10% dari total pendapatan daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Padang Pariaman masih rendah dan rentan terhadap fluktuasi kebijakan fiskal nasional.

Hasil analisis terhadap laporan Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan bahwa komposisi PAD di Padang Pariaman masih didominasi oleh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Namun, laju pertumbuhan PAD dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang tidak signifikan, bahkan cenderung stagnan. Hal ini selaras dengan temuan (Latifa et

al., 2025) yang menyatakan bahwa efektivitas APBD Kabupaten Padang Pariaman cukup baik dari sisi realisasi, tetapi belum diimbangi dengan peningkatan kemandirian keuangan.

Rendahnya PAD berdampak langsung terhadap terbatasnya ruang fiskal daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Menurut (Halawa et al., 2025) ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap transfer pusat membuat daerah sulit untuk mengembangkan inovasi kebijakan, karena belanja daerah sering kali terikat pada program pusat. Oleh karena itu, upaya memperkuat PAD menjadi sangat penting untuk meningkatkan fleksibilitas keuangan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di tingkat daerah.

2. Faktor-faktor penghambat peningkatan PAD

Berdasarkan hasil analisis dokumen keuangan dan literatur, terdapat beberapa faktor utama yang menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Pariaman, yaitu:

- | | |
|--|--|
| <p>a. Basis pajak daerah yang sempit</p> <p>Struktur ekonomi Padang Pariaman masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan kecil, dan jasa informal, yang relatif memiliki kontribusi pajak rendah. Potensi pajak dari sektor-sektor produktif seperti pariwisata, industri kreatif, dan jasa modern belum tergarap optimal. Menurut (Suryani & Firmansyah, 2023) salah satu penyebab rendahnya PAD di daerah non-industri adalah sempitnya basis pajak akibat minimnya aktivitas ekonomi formal dan lemahnya sistem pendataan objek pajak.</p> <p>b. Rendahnya kepatuhan wajib pajak</p> <p>Kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak daerah masih tergolong rendah, baik karena kurangnya kesadaran pajak maupun lemahnya sistem pengawasan. Pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak yang transparan.</p> | <p>(Nugraha & Hidayati, 2022) menegaskan bahwa kepatuhan pajak di daerah akan meningkat apabila sistem pemungutan bersifat adil, mudah diakses, dan menunjukkan manfaat langsung bagi masyarakat.</p> <p>c. Keterbatasan kapasitas aparatur daerah</p> <p>Salah satu tantangan krusial dalam optimalisasi PAD adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah. Masih terdapat aparatur yang belum menguasai teknologi digital, sementara sistem administrasi perpajakan modern memerlukan kompetensi teknis yang memadai. (Hutasoit & Saragih, 2023) menyebutkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, sertifikasi, dan literasi digital merupakan faktor penentu efektivitas pengelolaan PAD.</p> <p>d. Pengelolaan aset daerah yang belum produktif</p> <p>Kabupaten Padang Pariaman memiliki sejumlah aset potensial seperti lahan, gedung, dan unit usaha daerah, namun sebagian besar belum dimanfaatkan</p> |
|--|--|

secara maksimal. Banyak aset daerah yang idle (tidak produktif) dan hanya menjadi beban pemeliharaan. Menurut (Fata & Maryani, 2025), aset daerah dapat menjadi sumber PAD alternatif apabila dikelola secara profesional melalui kemitraan dengan sektor swasta atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kombinasi dari faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa permasalahan rendahnya PAD di Kabupaten Padang Pariaman bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga struktural dan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang sistematis, inovatif, dan berbasis digital untuk meningkatkan potensi PAD sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.

3. Strategi optimalisasi pendapatan asli daerah

Berdasarkan hasil analisis, strategi optimalisasi PAD di Kabupaten Padang Pariaman dapat dikelompokkan ke dalam lima pendekatan utama sebagai berikut:

a. Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah

Upaya ini dilakukan melalui pemutakhiran data objek dan subjek pajak, peningkatan pengawasan, serta penerapan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan pelayanan publik berbasis pajak agar masyarakat merasakan manfaat langsung dari kontribusi pajak yang mereka bayarkan. Menurut (Kusuma, 2021), pendekatan pelayanan publik berbasis kepatuhan sukarela dapat meningkatkan penerimaan pajak secara berkelanjutan.

b. Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Baru

Pemerintah daerah perlu mengembangkan sumber pendapatan baru di sektor-sektor potensial seperti pariwisata, ekonomi kreatif, dan perdagangan lokal. Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi wisata alam dan budaya Minangkabau yang besar untuk dikembangkan. (Sulaiman et al, 2023) menyatakan bahwa diversifikasi sumber PAD

melalui pariwisata dan sektor kreatif terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperluas basis pajak daerah.

c. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah

Inventarisasi aset perlu dilakukan secara menyeluruh untuk memetakan potensi aset yang dapat disewakan, dimitrakan, atau dikomersialisasikan. Aset yang selama ini non-produktif dapat dijadikan sumber pendapatan baru melalui kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga. Strategi ini selaras dengan penelitian (Rahmawati & Putra, 2024) yang menegaskan pentingnya tata kelola aset berbasis nilai ekonomi daerah (value-based asset management).

d. Digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi

Penerapan sistem e-tax dan e-retribusi menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem keuangan daerah yang transparan, efisien, dan bebas kebocoran. Dengan sistem

digital, seluruh transaksi dapat tercatat secara real time dan mudah diawasi. (Silviana, 2024) menemukan bahwa implementasi digitalisasi dalam sistem pajak daerah mampu meningkatkan kepatuhan pajak dan mempercepat realisasi pendapatan daerah hingga 20%.

e. Transparansi dan partisipasi publik

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan perencanaan PAD sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Pemerintah daerah perlu rutin mempublikasikan laporan realisasi PAD secara terbuka melalui media daring dan forum musyawarah pembangunan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Harahap, 2021) yang menyatakan bahwa partisipasi publik merupakan elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

4. Implikasi terhadap Kemandirian Fiskal Daerah

Implementasi strategi optimalisasi PAD secara konsisten dapat memperkuat kemandirian fiskal

Kabupaten Padang Pariaman. Peningkatan PAD akan memperluas ruang fiskal daerah, sehingga pemerintah dapat menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal tanpa terlalu bergantung pada kebijakan pusat. Selain itu, peningkatan PAD juga akan memperkuat prinsip good governance karena menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan publik (Putri & Hidayat, 2022).

Dengan meningkatnya PAD, Kabupaten Padang Pariaman memiliki peluang untuk mengalokasikan anggaran bagi pengembangan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, serta peningkatan layanan publik. Kondisi ini akan menciptakan siklus positif antara peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi PAD bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi strategi fundamental dalam mewujudkan daerah yang mandiri, inovatif, dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis

terhadap dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dan berbagai sumber pendukung, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Padang Pariaman masih rendah, karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih berada di bawah 10 persen. Kondisi ini menunjukkan ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Faktor-faktor utama yang menghambat peningkatan PAD meliputi: (1) basis pajak daerah yang sempit karena dominasi sektor informal dan pertanian, (2) rendahnya kepatuhan wajib pajak, (3) keterbatasan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah, serta (4) pengelolaan aset daerah yang belum produktif. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan PAD bersifat struktural dan memerlukan solusi strategis yang komprehensif.

Untuk menjawab persoalan tersebut, strategi optimalisasi PAD yang efektif mencakup beberapa

langkah utama, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah secara produktif, digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi, serta peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan keuangan daerah. Implementasi strategi ini akan memperkuat kapasitas fiskal daerah, memperluas ruang pembangunan, dan mendorong terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, optimalisasi PAD bukan hanya kebijakan teknis keuangan, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam mewujudkan daerah yang mandiri, inovatif, dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip good governance dan semangat desentralisasi fiskal di Indonesia.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman perlu melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kompetensi di bidang digitalisasi

sistem keuangan. Pemanfaatan teknologi digital menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pemungutan pajak serta retribusi daerah. Selain itu, pemerintah perlu melakukan pemutakhiran data wajib pajak secara berkala dan memperluas basis penerimaan melalui pengembangan sektor potensial seperti pariwisata, perdagangan, dan industri kreatif. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat struktur PAD secara berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan dalam bentuk regulasi yang lebih fleksibel serta pemberian insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan PAD secara signifikan. Partisipasi masyarakat dan pelaku usaha juga harus diperkuat melalui peningkatan kesadaran akan pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah. Sementara itu, kalangan akademisi dan peneliti diharapkan dapat melakukan kajian lanjutan untuk mengukur efektivitas

penerapan strategi digitalisasi dan manajemen aset daerah terhadap peningkatan PAD. Melalui penerapan saran-saran tersebut secara konsisten, Kabupaten Padang Pariaman diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskalnya, menciptakan tata kelola keuangan yang profesional dan transparan, serta mewujudkan pembangunan daerah yang inovatif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, H. M., MM, M. A., Wahyunadi, S. E., & Baehaqi, H. (2024). *Membangun Kapasitas Fiskal Daerah Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Deepublish.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka 2023*. Pariaman: BPS Kabupaten Padang Pariaman.
- Dewi Anggadini, S., Rohmawati, T., Damayanti, S., & Bramasto, A. (2021). KUALITAS APBD MENURUT PERSPEKTIF PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK. *JURNAL AGREGASI: AKSI REFORMASI GOVERNMENT DALAM DEMOKRASI*, 9(1).
- Eljawati, E., & Nurafdalina, N. (2024). Optimalisasi Pemanfaatan Aset Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 11(2), 144–155.
- Fata, M. T., & Maryani, D. (2025). Optimalisasi pemanfaatan aset daerah sebagai instrumen efisiensi fiskal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Magetan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 8(1), 31–44.
- Halawa, L. L., Sukma, M., Limbong, E., & Pangestoeti, W. (2025). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Indonesia Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Terkait Keuangan Negara. *Studi Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 43–53.
- Harahap, D. (2021). Partisipasi publik dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 210–223.
- Haykal, M. I., Utomo, D. D., Nalien, E. M., & Ardiensyah, A. (2025). Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Baubau: Analisis Implementasi Sistem Digital dan Peran Camat-Lurah. *Media Akuntansi Perpajakan*, 10(1), 126–132.
- Hutasoit, D. H., & Saragih, J. R. S. (2023). Penguatan kapasitas aparatur daerah dalam pengelolaan keuangan publik. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 27(1), 45–59.
- Latifa, A., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2025). Desentralisasi Fiskal: Tantangan Pengelolaan Pengeluaran Daerah dalam Mewujudkan Otonomi Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 7(3), 411–417.
- Nugraha, F., & Hidayati, N. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan*, 10(1), 89–101.
- Permana, D. (2024). Strategi Optimalisasi Manajemen Aset

- Daerah Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Journal Public Policy Services and Governance*, 1(2), 78–85.
- Putri, N. A., & Hidayat, M. (2022). Good governance dalam pengelolaan keuangan daerah: Perspektif transparansi dan akuntabilitas. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 56–70.
- Rahmawati, L., & Putra, D. (2024). Manajemen aset daerah berbasis nilai ekonomi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. *Jurnal Manajemen Aset dan Pembangunan Daerah*, 5(2), 77–90.
- Silviana, H. G. (2024). Inovasi digital dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Daerah*, 12(2), 112–125.
- Sisdianto, E. (2024). Analisis Terkait Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(4).
- Sugiyono, S., & Lestari, P. (2021). *Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional)*. Alfabeta Bandung, CV.
- Sulaiman, R., Andini, P., & Zulfikar, M. (2023). Diversifikasi sumber PAD melalui pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. *Jurnal Pembangunan dan Keuangan Publik*, 4(3), 215–228.
- Suryani, I., & Firmansyah, A. (2023). Analisis basis pajak daerah pada daerah non-industri. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 41–53.